



KEBIJAKAN KOREA SELATAN DALAM POLUSI UDARA LINTAS BATAS TIONGKOK

Jhanna Baitiez Rezqi

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

China has been trying to enhance their industry production in pursuit of economic growth to overcome poverty in the region. In other hand, the industrial growth have a negative impact on the environment, causing severe air pollution. Air pollution did not only hurt China but spread to South Korea's region, which is causing problem to South Korea. This study aims to find why South Korea did not protest related to China's Transboundary Air Pollution. The study uses qualitative research method with analytic descriptive research type. The study results are. The Cooperation between China and South Korea to reduce transboundary air pollution, both bilateral and multilateral are the Korea-China Environmental Cooperation Agreement dan the Korea-China Environmental Industry Investment Forum, Tripartite Environment Ministers Meeting (TEMM), Northeast Asian Subregional Program for Environmental Cooperation (NEASPEC), the Acid Deposition and Monitoring Network in East Asia (EANET) sand Long-range Transboundary Air Pollution in Northeast Asia (LTP), Northwest Pacific Action Plan (NOWPAP), Northeast Asian Conference on Environmental Cooperation (NEAC) and Environment Congress for Asia and the Pacific (ECO ASIA). Beside it, the main factor which is led South Korea did not protest to China's transboundary air pollution is economy factor.

Keywords: *transboundary air pollution, liberalism, economi interdependence*

1. Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi dan sosial di Korea Selatan mendapat sorotan dunia internasional. Selama 60 tahun terakhir mulai dari tahun 1952 hingga tahun 2012, Korea Selatan dapat menjelma dari salah satu negara termiskin di dunia menjadi salah satu negara paling terindustrialisasi di dunia. Fenomena ini disebut "*Miracle of Han River*" dan berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi Korea Selatan yang berorientasi ekspor termasuk pesatnya industri, prestasi di dunia teknologi, dan peningkatan standar hidup. Pendapatan Nasional Korea Selatan sekarang pada tahun 2012 berada pada posisi terbesar

ke - 11 di dunia. Korea Selatan juga memiliki indeks pembangunan manusia yang sangat tinggi yakni 0,897 (Ekaterina Zelenovskaya, 2012 :3).

Korea Selatan melakukan hubungan diplomasi dengan negara lain salah satunya dengan Tiongkok yang merupakan negara tetangganya terutama di bidang ekonomi. Perdagangan bebas Korea Tiongkok juga dinegosiasikan pada tahun 2012 dan disetujui pada bulan Desember 2015. Perdagangan bebas ini diharapkan dapat mempererat hubungan antara Korea Selatan dan Tiongkok yang diharapkan mulai dijalankan pada awal tahun 2016. Pada perdagangan ekspor dan impor kedua negara mencatat rekor yaitu 290 Milyar Dolar Amerika Serikat dan perdagangan bebas ini akan menurunkan 90% hambatan tarif perdagangan antar kedua negara (investkorea.org,23/12/2015)

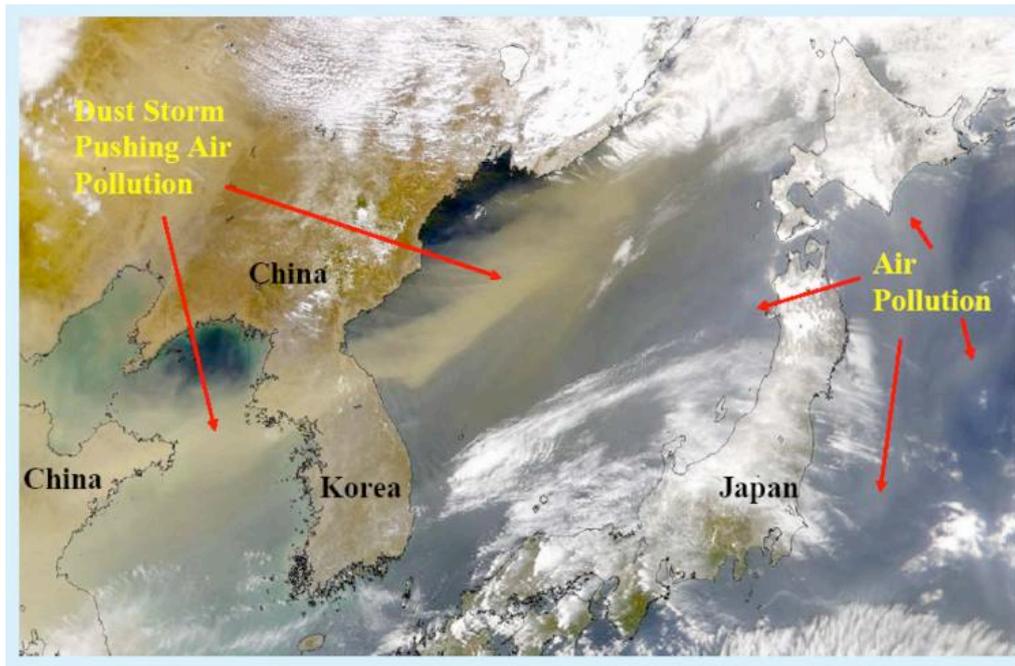
Tiongkok telah menjadi salah satu negara yang paling sukses dalam menarik investasi asing langsung sejak 1990-an. Dalam investasi asing langsung telah berkembang selama 20 tahun mulai tahun 1990 hingga tahun 2010 dari tingkat yang cukup rendah di tahun 1980 menjadi hampir \$ 100 miliar dolar per tahun pada tahun 2010 (Filip De Beule,2010 :11).

Selain dengan meningkatkan investasi asing , Pemerintah Tiongkok juga berusaha meningkatkan produksi industrinya untuk mengurangi kemiskinan. Pertumbuhan Industri ini diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan dengan cara mempekerjakan masyarakat miskin agar lebih produktif di sektor industri.

Di samping itu pembangunan ekonomi dan industri di Tiongkok tidak selamanya berdampak positif. Dampak negatif yang ditimbulkan dari pembangunan ekonomi dan industri ialah polusi. Polusi yang dibahas di sini ialah polusi udara. Polusi udara yang terjadi di Tiongkok telah menyebar tidak hanya di wilayah Tiongkok itu sendiri namun menyebar hingga Korea Selatan sebagai negara tetangga Tiongkok yang disebabkan oleh badai Gurun Gobi, sebuah fenomena alam yang dianggap wajar yang menyebabkan polusi udara secara alami, namun diperparah oleh polusi udara di Tiongkok .

Pada musim semi, angin dengan kekuatan yang sangat besar mengirimkan pusaran-pusaran awan debu tinggi ke udara, dan mengikuti arus angin secara cepat. Ketika gulungan raksasa itu bergerak ke timur yang pertama ialah ke arah Beijing dan kemudian menyeberangi pusat kawasan industri di Tiongkok, angin puting beliung tersebut menarik banyak polutan lainnya, mulai dari partikel-partikel yang sangat halus yang dikeluarkan dari pabrik-pabrik batu bara hingga merkuri beracun dari cerobong-cerobong asap industri (Doni Sudiana, 2002:2).

Gambar 1 Penyebaran Badai Gurun Gobi



Sumber: www.esrl.noaa.gov

Pakar pembangunan regional Tiongkok, Guan Lianji, menyatakan bahwa kondisi polusi yang parah disebabkan oleh 3 (tiga) faktor utama. Pertama, emisi industri berat; kedua, penggunaan batu bara sebagai bahan bakar utama; dan ketiga, kondisi geografis dan iklim (Mohammad Irham, 2009:29).

Emisi industri berat dihasilkan oleh pabrik-pabrik industri yang kurang memperhatikan permasalahan lingkungan sekitarnya. Limbah-limbah industri seperti merkuri, benzena, dan lain sebagainya dibuang ke alam tanpa disaring terlebih dahulu. Meskipun sebenarnya sebagian dari pabrik-pabrik tersebut memiliki teknologi penyaring limbah yang canggih, namun kebanyakan teknologi tersebut tidak digunakan akibat tingginya biaya operasional. Hal ini merupakan faktor penyumbang parahnya tingkat polusi udara di Tiongkok (Mohammad Irham, 2009 : 29).

Oleh karena itu Korea Selatan sebagai negara yang terkena imbas polusi udara dari Tiongkok berusaha membawa permasalahan polusi udara ke komunitas internasional. Korea Selatan juga berusaha memanfaatkan aktivis lingkungan Korea Selatan untuk mendukung langkah pemerintah Korea Selatan melobby Pemerintah Tiongkok dan berusaha mempropagandakan kepentingan nasional Korea Selatan terhadap masyarakat sipil di Tiongkok (english.chosun.com,12/11/2014).

Lembaga Swadaya Masyarakat Korea selatan yang bergerak dibidang lingkungan yang bernama "Friends of The Earth Korea" menyatakan para konglomerat manufaktur di Korea Selatan merasa khawatir dengan kondisi polusi yang ada di negaranya. Mereka menginginkan Pemerintah Korea Selatan memperketat peraturan mengenai hal - hal yang berbau polusi dan perusahaan harus menaatinya. Sementara melihat Tiongkok yang semakin memberi tanda bahwa akan tetap melanjutkan pembangunan di bidang Industri,

dapat diartikan akan menambah partikel - partikel beracun yang melintasi udara Korea Selatan (www.blogs.ft.com,12/11/2014).

2. Pembahasan

Penyebab polusi udara di Korea Selatan dari faktor internal yaitu kendaraan bermotor dan konsumsi energi. Kualitas udara di Korea Selatan telah menjadi isu hangat nasional. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh *Seoul Development Institute*, sebanyak 51,8% masyarakat Seoul merasa bahwa isu lingkungan menjadi salah satu hal yang penting, dimana survei itu terbagi bahwa sebanyak 68,3% merasa serius (13,% merasa serius dan 55,3% merasa sangat serius). Polusi udara yang terjadi diakibatkan oleh badai debu gurun dan partikel - partikel kecil dimana sumber utamanya disebabkan oleh Industri utama yang menyumbang pertumbuhan ekonomi negara dan pertumbuhan kendaraan bermotor yang sangat pesat dari 790.000 kendaraan pada tahun 1983 menjadi 18,8 juta kendaraan pada tahun 2012 (Anna Chung, 2014: 1).

Selain itu, konsumsi energi juga mempengaruhi polusi udara di Korea Selatan dari faktor internal. Pembangkit listrik berbasis fosil menyumbang peranan penting bagi ketahanan energi Korea Selatan, dimana Pembangkit Listrik Tenaga Batubara menyumbang 24,5 Gw atau 30% dari total kapasitas. Berdasarkan perencanaan energi yang telah disetujui, Korea Selatan berencana untuk meningkatkan kapasitas PLTB sebesar 44,9 GW pada tahun 2027. Pada akhir 2017, Pemerintah berencana membangun 15 PLTB dengan kapasitas 12,5 GW. Untuk pertama kalinya sejak 30 tahun terakhir, Pemerintah menyetujui perusahaan swasta untuk membangun PLTB untuk membantu penambahan kapasitas. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) juga memegang peranan di dalam energi dan pemerintah menyetujui penambahan 6 PLTG dengan kapasitas diatas 5 GW pada tahun 2027. Sekarang gas alam bersaing dengan batubara yang lebih murah dan sumber nuklir. Dan ketahanan energi masa depan bergantung pada biaya bahan bakar, kapasitas nuklir pemerintah dan tingkat investasi disektor energi (www.eia.gov,28/06/2015).

Polusi udara di Tiongkok juga menyebabkan hujan asam yang melanda seperempat daratan Tiongkok dan sepertiga lahan pertaniannya dimana hujan asam sendiri dapat merusak hutan, perikanan, dan tanaman yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sebanyak 50 % hujan asam di Jepang dan Korea Selatan berasal dari Tiongkok. Badai debu kuning juga turut memperparah polusi udara di Tiongkok. Badai debu ini membawa puluhan ribu ton partikel debu itu sendiri dan partikel polutan yang bercampur menjadi satu kemudian terbawa angin mulai dari Beijing, Seoul hingga Tokyo bahkan dampak badai debu ini terbawa hingga Amerika Utara. Badai debu yang hampir sama dengan badai salju juga memiliki kekuatan merusak setara dengan gempa bumi yang menyebabkan timbulnya korban manusia, ternak, tanaman dan memaksa penduduk agar menghindar dari bahaya badai debu dengan meninggalkan rumah mereka. (Mohammad Irham, 2009 : 33)

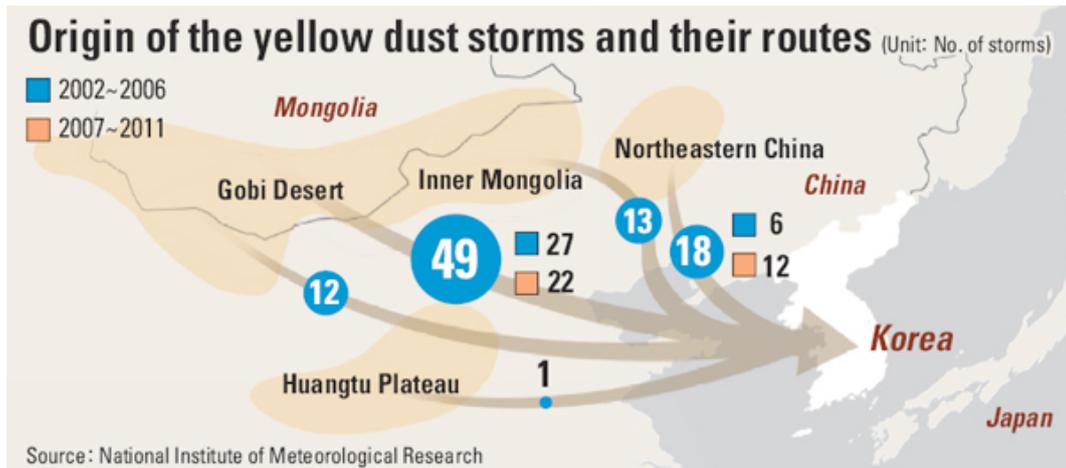
Institut Lingkungan Korea Selatan yang di danai oleh pemerintah mengemukakan bahwa debu ini membunuh 165 warga Korea Selatan setiap tahunnya dan menimbulkan penyakit pernapasan pada 1,8 % warga di sana. Kerugian ekonomi tahunan diperkirakan mencapai 5,5 triliun won atau Rp 54,1 triliun (Mohammad Irham,2009:10).

Setelah membuang berton-ton bahan campuran beracun itu di sepanjang deretan kota-kota besar dan kecil di Tiongkok, gulungan tersebut sampai di Jepang dan Korea. Di sana, menurut Badan Pembangunan Desa Korea Selatan, “badai satu kali saja dapat membuang lebih dari 8.000 ton pasir.” Badai terburuk menutupi bandar udara, jalan-jalan, toko-toko, dan sekolah-sekolah. Lebih luas lagi menurut Program Lingkungan PBB, biaya

badai debu ini bagi perekonomian kawasan itu mencapai lebih dari US\$ 6 juta pertahun (Mohammad Irham, 2009 :10).

Korea Selatan merupakan negara dengan kualitas udara yang dikategorikan buruk yang disebabkan oleh polusi methana yang disebarkan oleh aktivitas industrialisasi kimia dan energi di Tiongkok.(Alan Dunpont,2001:55). Selain itu pada bulan Maret 2002, badai debu gurun Gobi yang membawa polusi udara berat ke Korea Selatan juga menutup 4.494 sekolah dan membatalkan 40 penerbangan di Bandara Internasional Gimpo, Seoul (Junko Mochizuki and zhong Xiang Zhang,2011:9).

Gambar 2 Arah Badai Pasir Gurun Gobi yang Menuju Korea Selatan dan Jepang



Sumber: pds.joins.com

Selain itu debu halus yang berasal dari Tiongkok dan Mongolia membawa polusi udara di Seoul menyumbang sekitar 30-50% dari polusi yang ada di Korea Selatan

Gambar 3 Pembagian debu halus yang membawa polusi udara di Seoul



Sumber:pds.joins.com

Penelitian menemukan bahwa sebanyak 15.345 orang yang berumur diatas 30 tahun di Seoul dan Gyeonggi meninggal akibat penyakit yang disebabkan oleh polusi udara pada tahun 2010. Penelitian yang lainnya dari WHO (World Health Organizations) pada bulan Maret 2013 menyatakan bahwa 7 juta orang di dunia meninggal akibat polusi udara di dalam dan diluar ruangan atau seperdelapan dari jumlah kematian global. WHO melaporkan polusi udara menyebabkan penyakit jantung iskemik, stroke, infeksi pernafasan bawah pada anak - anak dan kanker paru - paru. Tim Peneliti dari Universitas Inha dan AJou menunjukkan bahwa kematian akibat polusi udara dapat menurun 57,9 % menjadi 10.866 jiwa pada tahun 2024 jika Kementerian Lingkungan Hidup melakukan manajemen polusi udara yang dicanangkan mulai 2014 dan level polusi udara berada dibawah 30 mikrogram per meter kubik. Akan tetapi jika tingkat polusi udara makin sama, maka jumlah kematian akibat polusi udara meningkat menjadi 25.781 jiwa pada tahun 2024 (www.koreatimes.co.kr, 27/06/2015).

Menurut WHO dan ATS (American Thoracic Society), polusi udara memiliki efek terhadap kesehatan baik dalam jangka pendek maupun panjang. Indikator jangka pendek dan panjang polutan udara terhadap kesehatan yaitu:

- a) Pengaruh jangka pendek yang berupa: (1)Perawatan di rumah sakit, kunjungan ke Unit Gawat Darurat (UGD) atau kunjungan rutin dokter, akibat penyakit yang terkait dengan respirasi (pernapasan) dan kardiovaskular (2) Berkurangnya aktivitas harian akibat sakit (3)Jumlah absensi (pekerjaan ataupun sekolah) (4) Gejala akut (batuk, sesak, infeksi saluran pernapasan) dan (5) Perubahan fisiologis (seperti fungsi paru dan tekanan darah)
- b) Pengaruh jangka panjang yang meliputi: (1) Kematian akibat penyakit respirasi/pernapasan dan kardiovaskular (2) Meningkatnya insiden dan prevalensi penyakit paru kronik (asma, penyakit paru osbtruktif kronis). (3)Gangguan pertumbuhan dan perkembangan janin (4) Kanker (io.ppi-jepang.org, 4/6/2014).

Media massa Korea Selatan menyalahkan Tiongkok dengan mempermasalahkan dan mengangkat isu secara ekstrim sebagai penyebab utama meningkatnya polusi udara di Korea Selatan. Artikel - artikel itu ditulis oleh Kim Sungmo dan Nah Haeran di dalam media *Chosun Ilbo*, Kim Jungsoo dalam media *Hankyoreh*, atau Jeon Seungmin di dalam *Dong-A Science*, dimana semua kesimpulan itu berisi tentang semua partikel - partikel halus polusi udara berasal dari Tiongkok. Masyarakat Korea juga berpendapat sama yakni polusi udara yang parah di Korea Selatan berasal dari Tiongkok, dan masyarakat berharap agar permasalahan ini dapat diselesaikan (Anna Chung,2014:3).

Jika Korea Selatan ingin mengatasi permasalahan polusi udara, maka harus bekerja sama dengan Tiongkok dan Mongolia. Pemerintah daerah di Korea Selatan juga mempunyai pengaruh yang besar di dalam memainkan perannya. Pemerintah Kota Seoul dan Beijing sedang mempersiapkan kerja sama didalam meningkatkan kualitas udara dengan sasaran kerjasama antar kota ke kota, dimana kerjasama ini meningkatkan kualitas udara dan saling bertukar informasi. Perjanjian lainnya yaitu menekan kerja sama mengenai peningkatan kualitas udara dengan Tianjin, Shanghai dan Ulan Bator. Tiongkok, sebagai korban badai debu kuning dan partikel halus, menaruh perhatian dan mengimplementasikan pengukuran partikel halus polusi udara secara terus menerus di kota - kota besar Tiongkok sejak Oktober 2012 (Anna Chung,2014:3).

Tiongkok bekerja sama dengan Korea Selatan dan Jepang yang dilakukan pada pertemuan Kementerian Lingkungan Hidup ketiga negara. Menteri Lingkungan Hidup Korea Selatan, Yoon Seong Kyu, menyatakan kepada media massa Korea Selatan, Yonhap

pada bulan Februari 2014 untuk mengembangkan pemantauan kadar partikel polusi udara yang bekerja sama dengan Tiongkok. Hal ini juga menekan bahwa pada kerja sama di bidang lingkungan ini merupakan sebuah garis dari "Northeast Asia Peace and Cooperation Initiative" yang dicanangkan Presiden Korea Selatan Park Geun Hye. Prakarsa ini menghasilkan "Asian Paradox", yang terkandung di dalam eksistensi ketegangan antarnegara terutama di dalam ketidaksetujuan secara wilayah maupun historis, di samping sebuah pertumbuhan ekonomi yang saling ketergantungan, bertujuan untuk mengembangkan gabungan dari pertanyaan - pertanyaan yang bersifat transnasional yang pada akhirnya bermuara pada kepentingan bersama. Oleh karena itu, banyak kerja sama trilateral, bilateral, baik nasional maupun lokal, yang sepertinya secara khusus menekankan pada ramalan polusi udara yang memuncak dibanding tindakan pencegahannya, dimana asal polusi udara jarang dibahas (Anna Chung, 2014:3).

Korea Selatan lebih menekankan kerja sama antarnegara dibandingkan dengan menempuh jalur hukum internasional untuk mencegah semakin parahnya polusi udara lintas batas. Meskipun kemajuan di dalam diplomatik terlihat dengan jelas untuk menangani masalah polusi udara lintas batas, Korea Selatan secara berhati - hati didalam menahan diri dengan memberi label polusi udara dari Tiongkok sebagai "dispute" atau "problem". Dengan kata lain Korea Selatan telah mengambil isu yang hangat ini sebagai kesempatan untuk menggalang kerja sama antar kementerian di negara - negara Asia Timur laut dan kerja sama penelitian. Selain itu Korea Selatan juga menganggarkan dana dan bantuan teknis kepada berbagai macam kerja sama regional dan sub regional yang ditujukan untuk mengukur dan mitigasi polusi udara lintas batas (Laura S. Henry , Jasper Kim, and Dongho Lee,2012:565).

Korea Selatan dan Tiongkok membentuk kerja sama bilateral yaitu *the Korea-China Environmental Cooperation Agreement* dan *the Korea-China Environmental Industry Investment Forum* namun kerja sama bilateral tersebut masih dirasa kurang efektif dikarenakan perjanjian kedua negara tentang polusi udara lintas batas hanya sekedar memonitoring sulfur dioksida ataupun nitrat saja, mengenyampingkan partikel polusi udara yang sangat kecil dan amat berbahaya yang dapat langsung masuk kedalam tubuh manusia dan metal berat yang dapat meracuni manusia sehingga Korea Selatan dan Tiongkok menjalin kerjasama dengan Jepang sehingga membentuk *Tripartite Environment Ministers Meeting*(TEMM). Tidak hanya itu kerja sama multilateral juga dibentuk yaitu *Northeast Asian Subregional Program for Environmental Cooperation* (NEASPEC) atau Program Kerja sama Lingkungan Negara - Negara Sub regional Asia Timur Laut untuk menangani polusi udara lintas batas dibawah naungan *United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific* (UNESCAP) pada tahun 1993 Beberapa contoh lain kerja sama multilateral yang berkaitan dengan polusi udara yaitu *the Acid Deposition and Monitoring Network in East Asia* (EANET), agenda penelitian bersama *Long-range Transboundary Air Pollution in Northeast Asia* (LTP),) (Laura S. Henry , Jasper Kim, and Dongho Lee,2012:555-575). *Northwest Pacific Action Plan* (NOWPAP) ,*Northeast Asian Conference on Environmental Cooperation*(NEAC) dan *Environment Congress for Asia and the Pacific*(ECO ASIA) (Mohammad Irham,2009:76).

Perdagangan bebas Korea Selatan dan Tiongkok merupakan sebuah perjanjian perdagangan bebas/ *Free Trade Agreement*(FTA)yang berbeda dibandingkan dengan perdagangan bebas yang dinegosiasikan oleh Korea Selatan ke negara lain selain Tiongkok. Hal ini disebabkan karena Korea Selatan memfokuskan diri dengan meminimalisir dampak negatif di sektor pertanian, perikanan dan peternakan dibandingkan dengan

memaksimalkan keuntungan dari pengurangan hambatan tarif ekspor ke negara tujuan. (Huh Moon-jong,2015:2).

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan ,perdagangan bebas Korea Selatan - Tiongkok akan mengurangi tarif sebesar 5,44 Milyar Dollar AS, dimana pengurangan tarif itu mencapai 6x lipat dari pengurangan tarif pada perdagangan bebas Korea Selatan-Amerika Serikat, yakni sebesar 930 Juta Dollar AS dan 4x lipat Perdagangan bebas Korea Selatan-Uni Eropa yakni sebesar 1,38 Milyar Dollar AS(Huh Moon-jong,2015:2).

Pada tahun 2009 terjadi penurunan jumlah perdagangan dibandingkan tahun 2007, hal ini dikarenakan pada waktu itu terjadi krisis ekonomi tahun 2008. Suplus neraca perdagangan Korea Selatan terhadap Tiongkok meningkat di tahun 2009 dibanding 2007. Hal ini menunjukkan antusiasme masyarakat Tiongkok menggunakan produk barang dan jasa Korea Selatan. Total perdagangan Korea Selatan – Tiongkok mencapai 220,8 Milyar USD pada tahun 2011 sedangkan pada tahun 2013 meningkat menjadi 228,9 Milyar USD. Korea Selatan sendiri mendapatkan surplus perdagangan dari Tiongkok yakni sebesar 62,8 Milyar USD (<http://www.kita.org/>).

Korea Selatan melakukan pengalihan perdagangan dari tahun 2000 hingga tahun 2013 terhadap 3 mitra dagang utama yakni Tiongkok, Amerika Serikat dan Jepang . Penurunan perdagangan Korea Selatan- Amerika Serikat dari tahun 2000 sebesar 20% menjadi 10% di tahun 2013. Sementara Peningkatan perdagangan Korea Selatan- Tiongkok dari tahun 2000 sebesar 9% menjadi 21% di tahun 2013. Penurunan terjadi di perdagangan Korea Selatan – Jepang dari tahun 2000 sebesar 16% menjadi 9% di tahun 2013. Peningkatan perdagangan Korea Selatan ke Tiongkok disebabkan karena pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang pesat pada tahun 2000-2013 sehingga Korea Selatan melihat bahwa Tiongkok merupakan “pasar gemuk”. Amerika Serikat dan Jepang mengalami ekonomi stagnan hingga penurunan ekonomi pada tahun 2000 hingga tahun 2013 (<http://www.kita.org/>).

Berkaitan dengan polusi udara lintas batas, posisi Korea Selatan dalam hal ini melakukan "pendekatan holistik" di dalam membangun hubungan diplomatiknya dengan Tiongkok yang memprioritaskan hubungan perdagangan antar negara. Korea Selatan tidak mau memperkeruh "hak istimewa" yang diberikan oleh Tiongkok dengan pangsa pasarnya yang besar dan kalah bersaing dengan investor lainnya di dalam merebut pangsa pasar di Tiongkok. Faktanya menunjukkan bahwa kerjasama di bidang penanggulangan polusi udara lintas batas yang telah dilakukan pada level kementerian masing - masing negara hanya menghasilkan tidak lebih dari sebuah deklarasi kerja sama di dalam proyek penelitian tanpa melibatkan ikut campur dan kepercayaan NGO kepada sebuah paradigma bahwa deklarasi - deklarasi mengenai polusi udara di Asia tidak bisa menakuti " posisi sakral" di dalam hubungan ekonomi (Laura S. Henry, Jasper Kim, dan Dongho Lee, 2012:582).

Di Korea Selatan, konflik antar birokrasi terlihat tumpang tindih antara peran *Low Carbon Green Growth Act* (LCGGA) dan pembentukan *Presidential Commission on Green Growth* (PCGG) tahun 2009. PCGG sendiri mempunyai kewenangan didalam membentuk strategi ekonomi nasional Korea Selatan yang berdasarkan prinsip - prinsip pertumbuhan ekonomi hijau dan memfokuskan pada permasalahan yang dihadapi Korea Selatan yaitu keamanan di bidang energi, efisiensi energi dan perubahan iklim. Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Informasi dan Ekonomi, Kementerian Perhubungan Darat dan Laut, serta Kementerian Strategi dan Keuangan bergabung kedalam LCGGA ini memfokuskan pada kebijakan karbon beremisi rendah di dalam segala pembangunan yang ada di Korea Selatan yang dengan kewenangan yang terpisah dari

PCGG. Namun pada akhirnya, kewenangan di dalam pembangunan pembangkit listrik semuanya diserahkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup (Laura S. Henry, Jasper Kim, and Dongho Lee, 2012:582).

Pendapatan perkapita Korea Selatan (33971 USD) lebih tinggi daripada Tiongkok (12879 USD) pada tahun 2013 (imf.org, 16/11/2015). Besar kecilnya pendapatan perkapita dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, iptek dan daya saing ekonomi. Dalam kaitannya pendidikan, sudah jelas bahwa pendidikan membuat masyarakat suatu negara menjadi lebih peka terhadap keadaan sekitar termasuk polusi udara. Jika masyarakat suatu negara bersikap responsif di dalam menyikapi polusi udara maka Pemerintah akan segera melakukan tindakan pengurangan polusi udara.

Tiongkok menyatakan bahwa perkembangan teknologi di bidang lingkungan sangat terbatas sehingga Tiongkok membutuhkan bantuan baik dana maupun sumber daya yang digunakan untuk alih teknologi di dalam mengatasi polusi udara. Sementara itu Korea Selatan tentunya lebih berpengalaman di bidang ini dikarenakan tingginya permintaan publik mengenai lingkungan udara yang bersih (Laura S. Henry, Jasper Kim, dan Dongho Lee, 2012:585).

3. Kesimpulan

Tiongkok dan Korea Selatan melakukan diplomasi publik dengan cara membentuk beberapa kerja sama baik bilateral maupun multilateral yang melibatkan negara – negara lain di Asia Timur seperti Jepang dan Mongolia di dalam mengatasi polusi udara. Media massa Korea Selatan menyalahkan Tiongkok dengan mempermasalahkan dan mengangkat isu secara ekstrim sebagai penyebab utama meningkatnya polusi udara di Korea Selatan selain itu reaksi publik di Tiongkok melalui media sosial turut menambah intensitas diplomasi Korea Selatan dan Tiongkok di dalam mengatasi polusi udara. Namun jika dilihat, Tiongkok merupakan pasar gemuk bagi ekspor Korea Selatan, hingga Korea Selatan tidak ingin hak-hak istimewanya dicabut oleh Tiongkok, dengan cara protes terlalu keras mengenai polusi udara lintas batas mengingat akan adanya persaingan produk seperti produk Jepang di pasar domestik Tiongkok

Perdagangan bebas Korea Selatan dan Tiongkok merupakan sebuah perjanjian perdagangan bebas/ *Free Trade Agreement* (FTA) yang berbeda dibandingkan dengan perdagangan bebas yang dinegosiasikan oleh Korea Selatan ke negara lain selain Tiongkok. Hal ini disebabkan karena Korea Selatan memfokuskan diri dengan meminimalisir dampak negatif di sektor pertanian, perikanan dan peternakan dibandingkan dengan memaksimalkan keuntungan dari pengurangan hambatan tarif ekspor ke negara tujuan.

Korea Selatan mendapatkan surplus perdagangan yang besar dari Tiongkok, dan merupakan negara penanam modal di Tiongkok serta melakukan pengalihan perdagangan terbesar yang sebelumnya bermitra terbesar di Amerika Serikat menjadi Tiongkok. Tiongkok merupakan negara penanam modal di Korea. Perdagangan Korea Selatan dan Tiongkok mengalami kenaikan dan penurunan yang dikarenakan oleh krisis ekonomi dunia tahun 2008 dan pemulihan ekonomi pasca krisis ekonomi di tahun 2010. Terlihat jelas kedua negara tersebut melakukan perdagangan yang saling menguntungkan. Berkaitan dengan polusi udara lintas batas, posisi Korea Selatan dalam hal ini melakukan "pendekatan holistik" di dalam membangun hubungan diplomatiknya dengan Tiongkok yang memprioritaskan hubungan perdagangan antar negara. Korea Selatan tidak mau memperkeruh "hak istimewa" yang diberikan oleh Tiongkok dengan pangsa pasarnya yang besar dan kalah bersaing dengan investor lainnya di dalam merebut pangsa pasar di

Tiongkok. Dalam hal ini penurunan hubungan diplomatik di bidang ekonomi dapat disimpulkan bukan karena meningkatnya polusi udara melainkan krisis ekonomi yang menghantam kedua negara itu pada tahun 2008. Setelah pemulihan ekonomi, perdagangan antara Korea Selatan dan Tiongkok kembali meningkat.

Daftar Pustaka

- _____. http://pds.joins.com/jmnet/koreajoongangdaily/_data/photo/2012/04/02004815.jpg) diakses tanggal 18 Juni 2015, pukul 23:39
- _____. http://pds.joins.com/jmnet/koreajoongangdaily/_data/photo/2015/01/11223539.jpg) diakses pada tanggal 28 Juni 2015 pukul 17:37
- _____. *Korea Air Pollution Problems*,
(<http://www1.american.edu/ted/KORPOLL.HTM>), diakses tanggal 23 Desember 2015 pukul 22:00
- Anna Chung (2014), *Korea's policy towards pollution and fine particle : a sense of urgency*, Asia Center.eu, 71 boulevard Raspail 75006 Paris – France
- Dodi Sudiana, Hiroaki Kuze, Nobuo Takeuchi (2002) , *Pemantauan Debu Kuning Menggunakan Satelit NOAA*, Center for Environmental Remote Sensing, Chiba University Proceeding Temu Ilmiah XI
- Dupont, Alan, (2001). *East Asia Imperilled; Transnational Challenges to Security*, Cambridge: Cambridge University Press
- Ekaterina Zelenovskaya(2012), *Green Growth Policy in Korea: A case study* , International Center for Climate Governance
- Filip De Beule and Daniël Van Den Bulcke (2010) , *The Global Crisis, Foreign Direct Investment and China: Developments and Implications*, Asia Paper:BRICs Vol 5, Brussel Institute of Contemporary China Studies
- International Monetary Fund, (<http://www.imf.org/external/index.htm>) diakses tanggal 16 November 2015 pukul 00:51 WIB
- Junko Mochizuki and zhong Xiang Zhang (2011), *Environmental Security and Its Implications for China's Foreign Relations*, East-West Center, Hawaii
- Kim Rahn, *Fine dust looms as top health risk*,
(http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2015/04/116_177387.html) diakses pada tanggal 27 Juni 2015
- Korea International Trade Association, (<http://www.kita.org/>), diakses tanggal 16 November 2015, pukul 00:05 WIB
- Mohammad Irham (2009) , *Isu Polusi Lingkungan China Dalam Hubungan China- Jepang: Perspektif Human Security(2001-2008)*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Pascasarjana Departemen Ilmu Hubungan Internasional: Jakarta
- Laura S. Henry , J asper Kim, and Dongho Lee(2012) , *From Smelter Fumes to Silk Road Winds: Exploring Legal Responses to Transboundary Air Pollution over South Korea*, 11 Wash. U . Global Stud. L. Rev. 565
- S. *Korea-China free trade deal to take effect on Dec. 20*, (http://www.investkorea.org/ikwork/iko/eng/cont/contents.jsp?no=608300001&unit=90202&bno=512110005&code=102060101&mode=&url_info=bbs_read.jsp) diakses tanggal 23 Desember 2015 pukul 09:30 WIB

- The Chosun Ilbo, *Pollution from China Is an International Problem*
(http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2013/11/04/2013110401705.html)
diakses tanggal 12 November 2014 pukul 01:16 WIB
- U.S Energy Information and Administration, *South Korea: Analysis*,
(<http://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=KOR>) diakses pada tanggal
28 Juni 2015
- WHO dan ATS (American Thoracic Society) 2005, dalam Jamal Zaini, *Dampak Polusi Udara Terhadap Kesehatan*, <http://io.ppi-jepang.org/article.php?id=244>, Diakses tanggal 4 juni 2014